

Jurnal Budget

Vol. 4, No. 1, 2019

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Ade Nurul Aida, S.E

Martha Carolina, S.E., Ak., M. Ak.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Rendy Alvaro, S.Sos

Editor

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Desain Cover

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska, SIP

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama “*Budget*” kembali terbit dan memasuki volume keempat. Jurnal Budget Volume 4 Edisi 1 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari awal tahun 2019 hingga terbit pada bulan Juli 2019.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam Jurnal *Budget* ini.

Jurnal *Budget* dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan anggota parlemen, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume keempat, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, selanjutnya Redaksi mengharapkan masukan terbuka dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara

Dewan Redaksi

Jurnal Budget

Vol. 4, No. 1, 2019

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	v
Daftar Isi	vii
Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, Penerimaan Pembiayaan dan Penanaman Modal Tetap Bruto terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia	
<i>Slamet Widodo</i>	1
Pengaruh Jarak ke Sekolah Terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia	
<i>Robby A. Sirait</i>	24
Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah	
<i>Ratna Christianingrum</i>	43
Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, dan PDB terhadap Ekspor Tembaga Indonesia	
<i>Rendy Alvaro</i>	64
Potensi, Tantangan, dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa Menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan	
<i>Dahiri</i>	82
Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik	
<i>Jessly Panjaitan</i>	101
Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	
<i>Marihot Nasution</i>	121
Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia	
<i>Martha Carolina</i>	144
Analisis Hubungan Impor Beras dan Faktor Musiman Terhadap Harga Gabah dan Beras	
<i>Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo</i>	164
Analisis Defisit Kembar dan Feldstein-Horioka <i>Puzzle</i> di Indonesia	
<i>Rastri Paramita & Mutiara Shinta Andini</i>	178

Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, Penerimaan Pembiayaan dan Penanaman Modal Tetap Bruto terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Slamet Widodo

Ringkasan

Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, namun juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan infrastruktur menuntut peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Peran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target alokasi belanja modal dalam APBD sebesar 30 persen dari total belanja daerah. Namun, dalam pelaksanaannya belum seluruh daerah memenuhi amanat ini.

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal di provinsi Kawasan Barat (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri atas 32 daerah provinsi yang terbagi dalam 16 provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dua daerah provinsi yang tidak masuk dalam penghitungan adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara disebabkan kinerja keuangannya sudah melebihi rata-rata daerah lain (DKI Jakarta) dan Daerah Otonomi Baru (Kalimantan Utara). Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2010-2017 daerah provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel *fixed effect model*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran transfer ke daerah yang lebih efektif dalam mempersempit kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan model yang dipakai adalah *Fixed Effect Model*. Seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah di KBI dan KTI. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan yang positif namun tidak secara signifikan memengaruhi belanja modal di daerah KTI dan KBI.

Pengaruh Jarak ke Sekolah terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia

Robby A. Sirait

Ringkasan

Salah satu determinan yang memengaruhi peningkatan kualitas SDM adalah level pendidikan masyarakat. Peningkatan level pendidikan masyarakat salah satunya dapat diwujudkan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Namun, capaian pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini masih belum menggembirakan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator capaian pendidikan yang masih relatif rendah. Rendahnya capaian tersebut terlihat dari rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 8,62 tahun dan perempuan sebesar 7,72 tahun atau setara hanya lulus kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih ada 21,16 persen anak usia sekolah SMP yang tidak bersekolah dan masih tingginya angka putus sekolah. Masih tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan angka putus sekolah tingkat SMP ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non ekonomi. Salah satunya adalah jarak ke sekolah, jauhnya jarak tempuh siswa dari rumah menuju sekolah dapat berdampak pada berkurangnya keinginan anak untuk bersekolah dan keinginan orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya atau mendaftarkan anaknya ke jenjang pendidikan tertentu (partisipasi sekolah). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh jarak tempuh dari rumah ke sekolah terhadap angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat di Indonesia dengan menggunakan kepadatan sekolah (*school density*) sebagai proksi variabel jarak tempuh dari rumah ke sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Fixed Effect Model* (FEM). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari 33 Provinsi di Indonesia dan kurun waktu data dari tahun 2010 sampai 2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jarak ke sekolah berpengaruh positif terhadap angka putus sekolah dan berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Artinya semakin jauh jarak dari tempat tinggal ke sekolah mendorong peningkatan persentase anak putus sekolah dan penurunan angka partisipasi sekolah.

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah

Ratna Christianingrum

Ringkasan

Nilai tukar mata uang merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Nilai tukar merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai tukar mata uang merupakan salah satu kunci perekonomian suatu negara. Melemahnya nilai tukar mata uang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar mata uang perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi pergerakannya. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh beberapa variabel makroekonomi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap USD. Dimana variabel makro yang digunakan yakni tingkat suku bunga, baik suku bunga domestik (tingkat suku bunga Bank Indonesia) ataupun suku bunga bank sentral Amerika Serikat, jumlah cadangan devisa, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran Indonesia serta inflasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk kuartalan dari kuartal pertama tahun 1990 hingga kuartal ketiga tahun 2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah dilakukan *seasonally adjusted*. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode *Vector Error Correction* (VECM).

Berdasarkan model VECM dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, variabel makro yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia dan jumlah uang beredar. Setiap peningkatan satu persen suku bunga Bank Indonesia, maka akan terjadi peningkatan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp63,97 *ceteris paribus*. Apabila terjadi peningkatan satu triliun Rupiah jumlah uang yang beredar, maka nilai tukar Rupiah terhadap USD akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp10,61 *ceteris paribus*. Untuk jangka pendek, tingkat suku bunga The Fed, jumlah cadangan devisa, serta neraca pembayaran Indonesia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Variabel makro yang memengaruhi secara signifikan nilai tukar Rupiah terhadap USD dalam jangka panjang adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar, serta tingkat inflasi. Setiap peningkatan satu persen tingkat suku bunga Bank Indonesia, maka dalam jangka panjang akan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp221,70 *ceteris paribus*. Setiap peningkatan satu triliun Rupiah jumlah uang yang beredar, maka dalam jangka panjang dapat menaikkan nilai tukar rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp55,01 *ceteris paribus*. Setiap peningkatan neraca pembayaran Indonesia sebesar satu juta USD, maka akan terjadi peningkatan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp1,97 *ceteris paribus*. Sedangkan setiap peningkatan satu persen inflasi, dapat menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap USD rata-rata sebesar Rp463,91 *ceteris paribus*.

Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, Dan PDB terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia

Rendy Alvaro

Ringkasan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri. Kondisi global yang sedang lesu membuat perdagangan ekspor Indonesia mulai terpengaruh dengan menurunnya ekspor. Salah satu komoditi nonmigas Indonesia yang cukup berkontribusi dalam ekspor yang berasal dari pertambangan adalah komoditi tembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap ekspor tembaga di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Nilai Kurs, Inflasi dan Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya Nilai Kurs, Inflasi, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap ekspor tembaga Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan terhadap variabel-variabel ekonomi dalam penentuan kebijakan ekonomi makro dalam menjaga pertumbuhan ekspor nonmigas khususnya ekspor komoditi tembaga.

Potensi, Tantangan, dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa Menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan

Dahiri

Ringkasan

Optimalisasi lahan rawa menjadi sawah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal tersebut merupakan langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional. Tambahan produksi dari hasil perluasan lahan sawah tahun 2015-2017 sebesar 1.255.013 ton dengan luas lahan baku sawah 239.162 hektar dan total anggaran sebesar Rp3,48 triliun. Perluasan lahan sawah baru mengalami hambatan karena ketersediaan lahan terbatas. Hal tersebut dikarenakan lahan telah dikuasi sebagai Hak Guna Usaha (HGU), kawasan hutan lindung, taman nasional dan lain-lain, serta tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya sehingga pemanfaatan lahan rawa merupakan solusi bagi perluasan lahan sawah. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan beberapa kesimpulan yaitu, luas lahan sawah yang ada saat ini cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya akibat dari konversi lahan sawah ke non sawah. Topologi lahan rawa sebagai alternatif pengganti sawah yang dikonversi cenderung sulit untuk dialihfungsikan ke fungsi lainnya. Potensi lahan rawa seluas 34,1 juta hektar yang terdiri dari lahan rawa lebak seluas 25,2 juta hektar dan lahan rawa pasang surut 8,9 juta hektar dengan total lahan yang sudah dikembangkan baru mencapai 1,8 juta hektar atau sebesar 5,39 persen dan ini masih sangat potensial untuk dikembangkan.

Potensi lahan rawa selain luasnya yang masih banyak tersedia, produktivitas padi sawah rawa dapat menyamai produktivitas padi sawah bukan rawa sebesar 5,1 ton per hektar, serta pembangunan saluran makro merupakan faktor utama keberhasilan usaha tani dalam produksi. Akan tetapi pembuatan saluran makro tidak termasuk dalam komponen biaya cetak sawah, karena saluran makro merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Penetapan standar biaya konstruksi cetak sawah berdasarkan kajian/*Focus Group Discussion* (FGD) terhadap rerata kondisi di lapangan dan diambil unit terendah yaitu sebesar 16 juta per hektar. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Rekomendasi yang dihasilkan yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan harus memastikan koordinasi dan kerja sama Kementan dan KemenPUPR dalam program optimalisasi lahan rawa untuk membangun saluran makro; entitas terkait pertanian harus saling koordinasi supaya saluran makro dan mikro dapat terintegrasi dengan baik; Pemerintah harus mengubah standar biaya konstruksi cetak sawah yang digunakan selama ini karena tidak mencerminkan karakteristik dan tingkat kesulitan antar daerah dengan standar biaya dalam interval yaitu biaya minimum Rp16.546.162 sampai biaya maksimum Rp31.811.067.

Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik

Jesly Panjaitan

Ringkasan

Plastik merupakan material favorit di masyarakat, karena karakteristiknya yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat dan relatif murah. Industri plastik merupakan industri strategis karena produk plastik digunakan di hampir semua sektor industri. Hal ini membuat jumlah sampah plastik yang meningkat setiap tahun. Yang menjadi persoalan, jumlah sampah plastik sudah tak terbendung dan butuh sampai ribuan tahun untuk terurai sempurna.

Dampak eksternalitas sampah plastik antara lain gas metana yang berakibat pada perubahan iklim dan gangguan kesehatan seperti alergi, asma, ketidakseimbangan hormon, gangguan reproduksi dan lain-lain.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan plastik berbayar. Salah satu opsi fiskal yang sudah ada sejak APBN 2017 adalah cukai plastik. Cukai plastik dinilai dapat menjadi alat pengendali atau pengawasan atas sampah plastik. Namun, sampai saat ini kebijakan cukai plastik belum juga diimplementasikan. Polemik diantara dua kementerian dan belum adanya peraturan pelaksana menjadi alasan belum diterapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan cukai plastik tidak dapat berdiri sendiri, perlu ada kebijakan lain yang mendukung. Selain itu, perlu peran serta Kementerian/Lembaga dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, insentif kepada pelaku industri daur ulang atau pengganti plastik dan disinsentif impor plastik, penerapan pajak sampah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait sampah plastik, penganggaran penanganan sampah dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah.

Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku dan menanamkan kesadaran pencemaran lingkungan yang disebabkan terutama sampah plastik adalah masalah seluruh umat manusia, sehingga diperlukan peran, kepedulian, dan kerja sama yang berkesinambungan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi Indonesia darurat sampah plastik.

Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Marihot Nasution

Ringkasan

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan pada aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan mengambil sampel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017.

Teknik analisis yang digunakan ialah regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model*. Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan tingkat kemiskinan provinsi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat pengangguran dan rasio kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut menyiratkan pentingnya pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan demi meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah di Indonesia

Martha Carolina

Ringkasan

Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jika tingkat pengungkapan tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh opini audit tahun 2016 terhadap pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/Lembaga.

Merujuk pada hasil penelitian, peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L di tahun 2017 disebabkan oleh K/L telah melakukan perbaikan opini audit tahun sebelumnya dengan melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan BPK. Oleh karena itu, K/L harus menindaklanjuti temuan yang belum ditindaklanjuti maupun temuan yang belum sesuai rekomendasi. Peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas kegiatan evaluasi audit dengan menyertakan prosedur evaluasi terhadap kertas kerja audit terkait pengujian atas pengungkapan K/L dalam kaitannya dengan perumusan opini BPK.

Analisis Hubungan Impor Beras dan Faktor Musiman terhadap Harga Gabah dan Beras

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

RINGKASAN

Impor beras selalu dituding menjadi penyebab penurunan harga gabah. Hal ini dikarenakan turunnya harga gabah cenderung akan beriringan dengan adanya impor beras. Para pelaku usaha pertanian mengklaim bahwa impor beras sebagai penyebab penurunan harga gabah. Namun, hasil perhitungan analisis data impor menunjukkan bahwa pengaruh impor terhadap penurunan harga gabah lebih kecil dibandingkan pengaruh dari faktor musim panen raya. Karena itu analisis pengaruh impor beras dan faktor musim panen raya diuraikan dalam tiga bagian yaitu analisis hubungan impor beras dan panen raya terhadap harga (Gabah Kering Panen) GKP, (Gabah Kering Giling) GKG, dan beras.

Pertama, faktor turunnya harga GKP bukan semata-mata karena impor beras, tapi faktor musiman panen raya juga berpengaruh terhadap penurunan harganya. Kedua, impor beras memiliki pengaruh tertinggi terhadap GKG dibandingkan GKP dan beras. Kinerja impor akan menekan harga GKP, sehingga upaya peningkatan nilai tambah pertanian dari GKP ke GKG cenderung akan menjadi sia-sia karena akan tergerus dengan impor tersebut. Namun, pengaruh musim panen raya terhadap GKG cenderung relatif kecil. Hal ini dikarenakan GKG memiliki daya simpan yang lebih lama dan potensi kerusakan maupun susut sangat kecil dari GKP. Hal ini yang membuat gejolak GKG lebih stabil dari GKP, berbeda dengan GKP yang dapat anjlok begitu dalam. Ketiga, impor beras memiliki pengaruh terendah terhadap harga beras dibandingkan harga GKP dan GKG. Beras merupakan produk akhir dari gabah, karena itu peningkatan nilai tambah pertanian ada baiknya menjadi beras.

Analisis Defisit Kembar dan Feldstein-Horioka Puzzle di Indonesia

Rastri Paramita & Mutiara Shinta Andini

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji tiga isu, *pertama*, mengkaji apakah defisit kembar terjadi di Indonesia beserta pengaruh antara defisit anggaran terhadap defisit transaksi berjalan pada periode 1972-2017. *Kedua*, mengkaji apakah Feldstein-Horioka yang mengkaitkan defisit transaksi berjalan dengan defisit anggaran dan investasi terbukti di Indonesia dalam periode 1972-2017. *Ketiga*, mengkaji faktor utama yang memengaruhi defisit transaksi berjalan di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah *granger's causality* untuk mengkaji defisit kembar di Indonesia dan *Autoregressive Distributed Lag-Error Correction Model (ARDL-ECM)* untuk mengkaji Feldstein-Horioka. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi defisit transaksi berjalan untuk dikaitkan dengan kondisi aktual Indonesia serta hasil dari kuantitatif..

Berdasarkan hasil *granger's causality*, dapat disimpulkan bahwa dalam periode 1972-2017, defisit kembar tidak terjadi di Indonesia dengan *probability* antara defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hasil ini sejalan dengan *Ricardian equivalence hypothesis*. Sedangkan untuk *Feldstein-Horioka* pada periode 1972-2017 terbukti terjadi di Indonesia. Pengaruh jangka panjang antara defisit anggaran dan investasi terhadap defisit transaksi berjalan tidak terjadi berdasarkan metode ARDL karena nilai wald-test tidak masuk dalam nilai range Pesaran pada $\alpha = 5$ persen di Lag 1 yaitu 4,94 – 5,71 dan tidak signifikan karena probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Defisit anggaran dan investasi berpengaruh terhadap defisit transaksi berjalan hanya dalam jangka pendek berdasarkan hasil penghitungan ECM karena nilai koefisien *Error Correction Term (ECT)* bertanda negatif dan signifikan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa *Current Account Deficit (CAD)* berdampak negatif kepada kebanyakan negara berkembang. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi defisit transaksi berjalan di Indonesia secara umum adalah kenaikan pembayaran pendapatan primer akibat surplus transaksi finansial. Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan dalam pendekatan ARDL-ECM yang menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dan transaksi berjalan di Indonesia hanya terjadi dalam jangka pendek. Pada kondisi transaksi berjalan yang *sustainable* secara "*weak form*" atau dibiayai oleh transaksi finansial ini perlu diwaspadai akan resiko negatif dimasa yang akan datang terutama Investasi Portofolio, untuk mencegah terjadinya risiko pembalikan (*abrupt reversal*) yang rentan krisis. Sehingga, fokus arah kebijakan pemerintah hendaknya mampu melaksanakan stimulus peningkatkan investasi langsung dalam negeri, terutama yang berorientasi ekspor atau mensubstitusi kebutuhan impor dan pendalaman pasar keuangan domestik dalam sub investasi portofolio maupun investasi lainnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan